

ANALISIS PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DALAM MENCEGAH FRAUD

Moh Adieb Ainur Rohim*), Dwiyan Sudaryanti) dan Hariri**)**

Universitas Islam Malang

Email: awwahh779@gmail.com

ABSTRACT

The cause of this study is to examine and take a look at the effect of public sector accounting at the accountability of public authorities inside the location of fraud prevention. This take a look at makes use of a quantitative approach. The website of this look at became conducted in authorities places of work within the city of Malang. This have a look at might be performed in October 2021 until it's miles completed. The populace on this take a look at consists of authorities agencies located in the metropolis of Malang. Sampling became done using a focused sampling method with predetermined criteria to achieve 57 samples. The effects of the study kingdom that public region accounting has a substantial effect at the responsibility of public establishments, the responsibility of presidency agencies has a considerable impact on fraud prevention, public region accounting has a enormous effect on fraud prevention, and public region accounting has a sizable impact on fraud prevention through accountability of public establishments for overall performance.

Keywords: *public area accounting, duty and fraud inside the performance of public establishments*

PENDAHULUAN

Penipuan ialah tindakan penyalahgunaan jabatan buat keuntungan langsung melalui penyalahgunaan asal daya atau aset organisasi. Penipuan merupakan persoalan yang terus muncul sampai waktu ini. tidak ada institusi/forum perusahaan yang benar-sahih bebas asal kemungkinan penipuan. Pelaku penipuan juga ada di seluruh strata, baik pekerja kelas atas maupun kelas bawah. oleh karena itu, perlu diperhatikan banyak sekali pihak agar berpengetahuan luas, waspada serta peduli pada lingkungan kerja terhadap potensi penipuan (ACFE, 2019).

Di Indonesia sendiri, perkara fraud semakin sebagai data yang dipublikasikan oleh ACFE, yang dilakukan setiap 2 tahun sekali, serta data terbaru yang dipublikasikan di tahun 2019, yang menyatakan bahwa perkara korupsi artinya aktivitas yang paling curang dengan 167 kasus menggunakan persentase 69,9%, diikuti dengan kecurangan penyalahgunaan aset/aset negara dan korporasi sampai 50 masalah dengan persentase 20,9%, dan yang terakhir artinya perkara penipuan. Keuangan dengan 22 perkara dengan persentase 9,2% (ACFE, 2019).

Masalah fraud yang sering terjadi di Indonesia sebagai penyebab kerugian terbesar. Penipuan dalam bentuk korupsi merupakan yang terbesar buat kerugian kurang dari Rs 10 juta. Menariknya, baik penipuan pada bentuk korupsi serta penipuan pelaporan keuangan dan penyalahgunaan aset dalam banyak perkara pada bawah Rs 10 juta, namun sebagian akbar dari seluruh insiden. Di sisi lain, perkara korupsi mempunyai insiden paling sedikit, namun kerugian terbesar melebihi Rs 10 miliar.

Berkenaan dengan faktor-faktor yang seringkali menyebabkan penipuan dalam suatu organisasi, Jika pengendalian internal tidak ada atau lemah atau dilakukan secara bebas serta tidak efisien, Karyawan dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran serta integritas mereka, Karyawan diatur, dieksploitasi menggunakan buruk, disalahgunakan atau mengalami tekanan besar buat mencapai tujuan serta target keuangan yang mengarah di kegiatan penipuan. Tidak efektif dan tidak sinkron menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Karyawan terpercaya memiliki dilema pribadi yang tidak dapat diselesaikan, umumnya dilema keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan.

Dengan demikian, perlu adanya pengawasan preventif melalui beberapa teknik deteksi fraud, diantaranya audit internal, yang adalah salah satu kontrol bahwa suatu organisasi harus meminimalisir terjadinya fraud. Menggunakan demikian, audit internal memainkan peran menjadi keliru satu pembawa penemuan awal, yang cukup dapat diandalkan buat organisasi. Audit eksternal biasanya adalah bagian independen yang berperan krusial menjadi badan pengawas penyajian laporan keuangan. Pengamatan serta pemantauan dalam sebagian akbar literatur dianggap sebagai keliru satu wahana kontrol manajerial yang cukup efektif buat meminimalkan sikap disfungsional.

Validasi dokumen artinya salah satu alat inovasi yang umumnya dilakukan pada audit serta analisis transaksi. Pengendalian manajemen adalah salah satu langkah preventif dan upaya meminimalisir fraud yang tidak bisa diabaikan oleh organisasi. Penegakan hukum adalah salah satu upaya pengendalian yang biasa dipergunakan secara luas oleh penegak hukum pada Indonesia serta perkembangan teknologi seiring dengan perkembangan fraud yang terjadi dengan menggunakan wahana teknologi (Anthony serta Govindarajan, 2016).

Berasal sekian banyak kendala yang bisa ditimbulkan oleh fraud, perlu adanya akuntabilitas kepada forum publik sebagai bentuk akuntabilitas atas kinerja otoritas publik. Aplikasi rapikan kelola pemerintahan yang baik adalah kehendak kita bersama. Diyakini bahwa akuntabilitas berpotensi mengubah keadaan pemerintahan, yang tidak dapat menyampaikan pelayanan publik dengan baik dan korup, menuju tatanan pemerintahan yang demokratis. Pembentukan pemerintahan yang akuntabel akan menerima dukungan dari rakyat. Terdapat kepercayaan publik terhadap apa yang diatur, direncanakan dan dilaksanakan oleh program-acara yang berorientasi pada publik. Di pihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen Pemerintah buat melayani warga .

Dalam konteksnya, menjadi organisasi pelayanan publik, pemerintah harus memastikan transparansi serta akuntabilitas publik pada pengelolaannya. Akuntabilitas pemerintah ialah perwujudan tanggung jawab suatu badan publik buat bertanggung jawab atas misi organisasi buat mencapai tujuan serta sasaran yang sudah ditetapkan melalui alat akuntabilitas terencana. Dalam konteks ini, sasarannya merupakan keuangan dan non finansial (BPKP, 2002). Akuntabilitas publik sinkron menggunakan ciri tata kelola pemerintahan yang baik sehubungan dengan partisipasi, aturan LAS, transparansi; kecepatan, orientasi mufakat, keadilan, efisiensi serta efektivitas dan visi seni manajemen (Mardiasmo, 2002).

Kerangka hukumnya ialah agar setiap pejabat publik konsisten serta patuh pada menjalankan tanggung jawabnya buat menjalankan akuntabilitas atas kinerja. Berdasarkan Soleman (2007), saat ini ada tiga ayat peraturan perundang-undangan keuangan publik yang menyampaikan dasar hukum bagi reformasi keuangan publik pada rangka tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu, Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 wacana Perbendaharaan Negara, Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang investigasi Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Publik dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 perihal Keuangan Publik.

Di bidang administrasi publik, undang-undang juga sudah disusun pada bentuk Keputusan Presiden nomor 7 Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 perihal tanggung jawab forum pemerintah (ACIP), yang artinya salah satu upaya Pemerintah buat meningkatkan aplikasi tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Mengingat banyak sekali peraturan perundang-undangan yang telah dimuntahkan, diharapkan akuntabilitas atas kegiatan lembaga publik akan terjamin.

Ketidapatuhan dan kepedulian terhadap penerapan sistem akuntansi sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku waktu ini terus terjadi di banyak wilayah, sesuai Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 "wacana investigasi Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Publik" dan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, perlu adanya akuntansi yang baik pada bidang publik.

Hal ini disebabkan oleh berita bahwa akuntansi sektor publik merupakan mekanisme metode akuntansi serta analisis yang diterapkan pada pengelolaan dana publik pada forum serta departemen publik yang lebih tinggi di bawahnya, otoritas lokal, perusahaan negara, BUMD, LSM serta dana sosial, dan pada proyek kolaborasi publik-partikelir (Bastian, 2014: 2).

Akuntansi sektor publik terkait erat menggunakan penerapan dan perlakuan akuntansi domain publik. Domain publik sendiri memiliki area yang relatif luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta/usaha. Haryanto, dkk., (2017:1) menyatakan bahwa, Jika ditinjau lebih dalam, akuntansi sektor publik memainkan peran krusial dan menjadi bahan diskusi baik oleh praktisi sektor publik maupun akademisi. Perdebatan tentang akuntansi sektor publik, yang seharusnya mendapat manfaat berasal bagian yang lebih besar asal praktisi serta akademisi, serius pada upaya buat membuatkan sektor publik, yang diklaim kurang efisien serta kurang menarik, untuk mengikuti sektor swasta, yang diklaim lebih maju serta efisien. Namun, perhatian lebih lanjut kini telah diberikan pada kalangan praktisi, terutama pemerintah, buat menilai kelayakan praktik administrasi publik, yang meliputi kebutuhan untuk menaikkan akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan perencanaan pembangunan, supervisi serta keahlian, dan banyak sekali implikasi keuangan terhadap kebijakan pemerintah.

Penerapan akuntansi yang sempurna pada sektor publik akan menaikkan akuntabilitas forum publik, mirip yang ditunjukkan oleh Pamungkas (2012) bahwa penerapan akuntansi di sektor publik mensugesti akuntabilitas lembaga publik, dan Bila akuntabilitas forum publik baik, yang ditimbulkan oleh akuntansi sektor publik, maka akan mencegah penipuan, seperti yang ditemukan Santoso et al (2008) bahwa penerapan forum publik Akuntabilitas publik terhadap instansi pemerintah bisa mencegah penipuan.

Berdasarkan latar belakang serta penelitian di atas, penelitian ini berminat merevisi penerapan akuntansi sektor publik, akuntabilitas atas aktivitas forum publik, yang berjudul "Analisis dampak penggunaan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas lembaga negara pada pencegahan penipuan".

LANDASAN TEORI

Akuntansi Sektor Publik

Haryanto, dkk. (2017:1) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik harus menyediakan layanan publik buat memenuhi kebutuhan publik. Pada beberapa hal, akuntansi sektor publik tidak selaras menggunakan akuntansi sektor swasta. Perbedaan sifat serta karakteristik akuntansi tadi ditimbulkan oleh disparitas lingkungan yang mempengaruhinya.

Akuntabilitas Lembaga Publik

Akuntabilitas atas kinerja merupakan evolusi dari aktivitas yang dilakukan oleh seorang karyawan, apakah ia masih berada pada jalan menuju otoritasnya atau sudah jauh melampaui tanggung jawab dan otoritasnya (Iedvina, 1991).

Penipuan

Fraud biasanya bisa dibagi menjadi tiga jenis kegiatan, yaitu: penyalahgunaan aset, false statement pada laporan keuangan serta korupsi (Sihombing et., al 2019). Berdasarkan yang akan terjadi survei yang dilakukan oleh association of certified fraud examiners (acfe-ic) cabang indonesia, korupsi merupakan jenis penipuan yang paling umum pada indonesia, diikuti oleh penyalahgunaan aset dan , akhirnya, penipuan pelaporan keuangan.

Kerangka Konseptual

Sesuai landasan teori dan penelitian sebelumnya, kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan menjadi berikut:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian

Sesuai akibat penelitian sebelumnya, tinjauan pustaka, dan kerangka konseptual, penelitian ini menggunakan hipotesis :

- H₁: penerapan akuntansi pada sektor publik mempunyai dampak signifikan terhadap akuntabilitas forum publik
- H₂: akuntabilitas otoritas publik mempunyai dampak signifikan di pencegahan penipuan
- H₃: sosialisasi akuntansi sektor publik memiliki dampak signifikan pada pencegahan penipuan
- H₄: penggunaan akuntansi sektor publik menghipnotis akuntabilitas forum pemerintah pada pencegahan penipuan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, adalah penelitian ini menggunakan analisis data statistik atau nomor . Situs penelitian ini adalah instansi pemerintah yang berlokasi di kota Malang. Penelitian ini akan dilakukan di bulan Oktober 2021 sampai selesai.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian yang digunakan merupakan instansi pemerintah di seluruh kota Malang. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode pengambilan sampel yang ditargetkan dengan kriteria yang dipengaruhi, sehingga menghasilkan 57 sampel.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data utama. Dalam penelitian ini diperoleh data primer dari informasi lapangan kepada Pemerintah Kota Malang secara daring melalui Google dan metode pengumpulan data pada penelitian menggunakan memakai metode informasi lapangan, serta buat informasi lapangan yang digunakan yaitu berita umum terbuka serta pribadi, sehingga responden hanya perlu memilih jawaban yang tersedia buat informasi, dan survey diberikan pribadi pada responden. Skala pengukuran artinya output yang digunakan sebagai acuan buat menentukan panjang pendek interval pada alat ukur.

Metode Analisis Data

Statistik Deskriptif

Di bawah ini merupakan tabel yang mencantumkan statistik deskriptif menggunakan variabel studi umum , baik variabel dependen juga variabel independen

Tabel 1 Deskriptif statistik

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntansi Sektor Publik (X)	57	2,40	5,00	3,7860	,72787
Akuntabilitas Kinerja (Z)	57	3,00	5,00	4,0570	,62324
Pencegahan Fraud (Y)	57	2,75	5,00	4,0175	,60846
Valid N (listwise)	57				

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

berdasarkan Tabel 1, statistika deskriptif di variabel studi dapat dirumuskan menjadi berikut:

Variabel akuntansi sektor publik (X) menerima nilai minimum 2,40 dan 5,00 untuk nilai maksimum, menggunakan homogen-homogen 3,7860 serta standar deviasi 0,7278. Berasal akibat tadi, diindikasikan bahwa di variabel akuntansi sektor publik, distribusi respon terendah

adalah 2,40 dan respon tertinggi adalah 5,00, sedangkan nilai homogen-homogen adalah 3,786, yang berarti secara umum dikuasai responden sepakat menggunakan aplikasi yang diajukan menggunakan rentang respon 0,7278 antar responden.

Variabel akuntabilitas pemerintah (Z) menerima nilai minimal 3,00 serta lima,00 buat nilai maksimal, dengan homogen-homogen 4,0570 serta nilai deviasi standar 0,62324. Berasal akibat tadi, diindikasikan bahwa di variabel akuntabilitas forum publik, distribusi respon terendah merupakan 3,00 dan respon tertinggi merupakan 5,00, dan rata-rata adalah 4,0570, yang berarti secara umum dikuasai responden putusan bulat menggunakan pernyataan yang disampaikan dengan rentang respon antara responden sebesar 0,62324.

Nilai minimum variabel pencegahan penipuan (Y) ialah 2,75 serta 5,00 buat nilai maksimum, menggunakan nilai rata-rata 4,0175 serta nilai deviasi baku 0,60846. Asal akibat tersebut, diindikasikan bahwa pada variabel Fraud Prevention, distribusi respon terendah adalah dua,75, serta respon tertinggi ialah 5,00, serta nilai homogen-homogen ialah 4,0175, yang artinya mayoritas responden sepakat menggunakan pernyataan yang disajikan dengan response range antara responden sebesar 0,60846.

Uji Validitas

Tes ini dipergunakan buat penelitian yang menggunakan berita umum atau informasi lapangan buat mengetahui apakah alat yang digunakan pada penelitian ini valid atau tidak, berikut hasilnya.

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Instrument	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Y (Pencegahan Fraud)	1	0,877	0,2162	Valid
	2	0,877	0,2162	Valid
	3	0,838	0,2162	Valid
	4	0,899	0,2162	Valid
Z (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	1	0,829	0,2162	Valid
	2	0,831	0,2162	Valid
	3	0,814	0,2162	Valid
	4	0,760	0,2162	Valid
X1 (Sistem Informasi Akuntansi)	1	0,888	0,2162	Valid
	2	0,853	0,2162	Valid
	3	0,914	0,2162	Valid
	4	0,905	0,2162	Valid
	5	0,762	0,2162	Valid

Tabel 2 menunjukkan bahwa:

Variabel pencegahan penipuan (Y) terdiri asal 4 titik pertanyaan menggunakan nilai R yang dihitung mulai berasal 0,838 nilai R yang dihitung (terendah) hingga 0,899 (nilai R tertinggi yang dihitung) > tabel R 0,2162. dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa variabel Pencegahan Fraud adalah valid.

Variabel akuntabilitas lembaga publik (Z) terdiri asal 4 poin pertanyaan menggunakan asumsi nilai R berkisar antara 0,760 (terendah) sampai 0,831 (tertinggi) > tabel 0,2162. menggunakan demikian, bisa disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas aktivitas lembaga publik ialah valid.

Variabel akuntansi sektor publik (X) terdiri dari 5 soal menggunakan nilai R yang dihitung mulai berasal 0,762 (terendah) sampai 0,914 (tertinggi) > Tabel R 0,2162. dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel akuntansi sektor publik valid.

Uji Reliabilitas

Tes ini dibuat untuk mengetahui apakah setiap elemen instrumen pada setiap variabel penelitian dapat diandalkan atau tidak, berdasarkan hasil perhitungan statistik, yang akan terjadi investigasi reliabilitas diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Instrument	Conbach's alpa	Keterangan
Y	Pencegahan Fraud	0,895	Reliabel
Z	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0,820	Reliabel
X	Sistem Informasi Akuntansi	0,916	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Diketahui berasal hitungan bahwa:

Pada variabel Pencegahan Fraud diperoleh nilai Alpha Cronbach sebesar $0,895 > 0,6$, sehingga diperoleh variabel Fraud Prevention.

Pada variabel Akuntabilitas kegiatan forum negara, nilai Alpha Cronbach diperoleh $> 0,6$, sebagai akibatnya variabel akuntabilitas aktivitas lembaga negara dinyatakan olehgugp menerima amanah.

Di variabel akuntansi sektor publik diperoleh nilai Alpha Cronbachsebanyak $0,916 > 0,6$, sebagai akibatnya variabel akuntansi sektor publik dinyatakan dapat diandalkan.

Uji Normalitas

Fungsi dari uji normalitas merupakan menjadi tester contoh regresi, terlepas dari apakah variabel destruktif (residual) memiliki normalitas atau tidak, nilai residu harus mengikuti distribusi normal. Hasil uji normalitas pada penelitian ini ialah menjadi berikut.

Tabel 4Hasil Uji Normalitas

		X	Z	Y
N		57	57	57
Normal Parametersa,b	Mean	3,7860	4,0570	1,3775
	Std. Deviation	,72787	,62324	,17165
Most Extreme Differences	Absolute	,106	,113	,109
	Positive	,106	,113	,089
	Negative	-,093	-,095	-,109
Test Statistic		,106	,113	,109
Asymp. Sig. (2-tailed)		,176c	,070c	,200c,d

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berasal Tabel 4 di atas dapat disimpulkan bahwa nilai normalitas yang dapat diperoleh berasal masing-masing variabel bisa ditinjau dari Asym. Sig (2-tailed) sebagai berikut.

Dalam variabel Pencegahan Penipuan, nilai Asym. Sig (2-tailed) sebesar $0,200 > 0,05$ setelah itu variabel Fraud Prevention membagikan bahwa data umumnya didistribusikan..

Pada variabel Akuntabilitas kegiatan forum negara, nilaiAsym. Sig (2-tailed) sebesar $0,070 > 0,05$ maka variabel akuntabilitas kinerja lembaga negara ditunjukkan, data biasanya didistribusikan.

Di sektor publik, akuntansi variabel memperoleh nilai Asym. Sig (2-tailed) sebesar $0,200 > 0,05$ kemudian ditunjukkan variabel akuntansi sektor publik, data umumnya didistribusikan.

Hasil Analisis Jalur

Analisis jalur ialah analisis jalur – ini ialah diagram yang menghubungkan variabel bebas, menengah, dan dependen. Dalam penelitian ini, koefisien regresi memakai koefisien standar, hal ini disebabkan oleh kabar bahwa koefisien path intinya ialah koefisien regresi standar.

Tabel 5 Hasil Analisis Jalur Model 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,888	,331		5,709	,000
X	,573	,086	,669	6,675	,000

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Sesuai Tabel 5, bisa dipandang bahwa yang akan terjadi analisis lintasan contoh 1 mempunyai nilai koefisien X sebanyak 0,669. Berasal yang akan terjadi-yang akan terjadi ini persamaan berikut diperoleh:

$$Z = 0,669 X + e \\ (0,000)$$

Interpretasi contoh persamaan analisis jalur contoh 1 ialah bahwa koefisien regresi buat variabel X mempunyai nilai positif, yang sama dengan 0,669, yang berarti bahwa ada korelasi positif pada koefisien X menggunakan variabel Z. Saat variabel X memiliki nilai konstan, variabel Z akan semakin tinggi sebanyak 0,669

Tabel 6 Hasil Analisis Jalur Model 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,009	,351		2,872	,006
Z	,742	,086	,760	8,661	,000

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berasal Tabel 4,7, dapat dilihat bahwa hasil analisis jalur model 2 memiliki nilai koefisien Z sebanyak 0,760. Dari yang akan terjadi ini, persamaan berikut diperoleh:

$$Y = 0,760 Z + e \\ (0,000)$$

Interpretasi contoh 2 berasal model persamaan analisis jalur merupakan bahwa koefisien regresi pada variabel Z diperkirakan secara positif sebanyak 0,760, yang berarti bahwa terdapat rasio positif berasal koefisien Z terhadap variabel Y. Ketika variabel Z mempunyai nilai kontinu, variabel Y akan semakin tinggi sebesar 0,760

Tabel 7 Hasil Analisis Jalur Model 3

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,706	,297		5,749	,000
X	,611	,077	,730	7,930	,000

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Sesuai Tabel 4,8, bisa dilihat bahwa hasil analisis lintasan model 3 memiliki nilai koefisien X sebesar 0,730. dari akibat ini, persamaan berikut diperoleh:

$$Y = 0,730 X + e \\ (0,000)$$

Interpretasi model contoh persamaan buat menganalisis jalur model tiga adalah bahwa koefisien regresi buat variabel X artinya nilai positif yang sama dengan 0,730, yang berarti bahwa ada korelasi positif pada koefisien X dengan variabel Y. Ketika variabel X mempunyai nilai konstan, variabel Y akan meningkat sebesar 0,730

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan buat mengukur seberapa banyak suatu contoh bisa menjelaskan variasi dalam variabel independen. Di bawah ini merupakan hasil dari beberapa koefisien buat memilih penelitian ini.

Tabel 8 Hasil Koefisien Determinasi Model 1

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,669a	,448	,438	,46742

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Akibat faktor penentuan bisa dipandang menggunakan melihat Tabel 4,9, dimana nilai R kuadrat yang disesuaikan merupakan 0,448, yang berarti variabel akuntansi sektor publik mempunyai dampak 44,8 % terhadap variabel akuntabilitas lembaga publik. Sementara itu, 55,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dipergunakan dalam penelitian ini.

Tabel 9 Hasil Koefisien Determinasi Model 2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,760a	,577	,569	,39934

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Hasil penentuan faktor determinasi bisa dicermati dengan melihat Tabel 8, dimana kuadrat R yang disesuaikan merupakan 0,557, yang berarti variabel akuntabilitas forum publik memiliki pengaruh 57,7% terhadap variabel Pencegahan Fraud. Sementara itu, 42,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dipergunakan dalam penelitian ini

Tabel 10 Hasil Koefisien Determinasi Model 3

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,730a	,533	,525	,41937

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Hasil faktor determinasi bisa dilihat menggunakan melihat tabel 9, dimana kuadrat R yang disesuaikan adalah 0,533, yang berarti variabel akuntansi sektor publik mempunyai dampak 53,3 % terhadap variabel pencegahan fraud. Sementara itu, 46,7% ditentukan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Hasil Uji t

Tabel 11 Hasil Uji t Model 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,888	,331		5,709	,000
X	,573	,086	,669	6,675	,000

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Sesuai Tabel 4,10, diindikasikan bahwa variabel akuntansi sektor publik (X) mempunyai perhitungan sebanyak 6,675 menggunakan nilai $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa H1 diterima, sehingga Anda bisa mengetahui bahwa variabel akuntansi sektor publik (X) memiliki akibat yang signifikan terhadap akuntabilitas lembaga publik (Z) dan memiliki nilai positif. Ialah, Jika akuntansi sektor publik semakin tinggi, akuntabilitas forum publik akan semakin tinggi. Kebalikannya, Jika akuntansi sektor publik menurun, akuntabilitas forum publik dalam kinerja akan menurun.

Akuntansi sektor publik ialah keliru satu proses pencatatan, pengklasifikasian, analisis serta pelaporan transaksi keuangan asal suatu organisasi publik yang memberikan informasi keuangan, sedangkan akuntabilitas atas kegiatan otoritas publik ialah bentuk akuntabilitas dalam mencapai tujuan sesuai menggunakan misi yang ditetapkan, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai yang dihasilkan menetapkan taraf imbas dan nilai positif yang signifikan, sehingga kepatuhan akan mencatat kualitas berita yang disampaikan oleh sektor publik akuntansi akan mempengaruhi peningkatan akuntabilitas aktivitas lembaga publik, sehingga apabila akuntansi sektor publik meningkat, akuntabilitas forum publik akan meningkat serta kebalikannya, jika akuntansi pada sektor publik menurun, akuntabilitas forum publik akan menurun.

Akibat penelitian ini sejalan menggunakan yang akan terjadi penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2016), yang menyatakan bahwa akuntansi sektor publik mempengaruhi akuntabilitas forum publik. Namun, yang akan terjadi penelitian ini tidak sesuai menggunakan yang akan terjadi penelitian yang dilakukan oleh Salamah et., al (2020), yang menyatakan bahwa akuntansi sektor publik tidak dapat menghipnotis akuntabilitas otoritas publik.

Tabel 12 Hasil Uji t Model 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,009	,351		2,872	,006
Z	,742	,086	,760	8,661	,000

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4.11, diindikasikan bahwa variabel akuntansi sektor publik (X) mempunyai perhitungan sebanyak 8,661 menggunakan nilai $0,000 < 0,05$, yang menandakan bahwa H2 diterima, sebagai akibatnya anda dapat mengetahui bahwa variabel akuntabilitas publik (Z) memiliki dampak yang signifikan terhadap pencegahan fraud (Y) serta memiliki nilai positif. Merupakan, Bila akuntabilitas instansi pemerintah meningkat, maka pencegahan fraud akan meningkat. Di sisi lain, Bila akuntabilitas lembaga publik menurun, maka pencegahan fraud akan menurun.

Kerangka akuntabilitas kinerja bertujuan buat memastikan bahwa pemerintahan serta pembangunan diatur secara efektif, berhasil, bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan kronisme. Yang akan terjadi penelitian memberikan bahwa sosialisasi serta peningkatan kerangka akuntabilitas kinerja akan berdampak di pencegahan fraud. Kerangka akuntabilitas kinerja berperan pada menaikkan planning, evaluasi serta kinerja forum publik terbuka berasal waktu ke saat. Menurut laporan akuntabilitas, rakyat dapat mengetahui penggunaan dana publik Bila dipergunakan secara efektif, efisien, hemat buat berdampak di pencegahan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan akibat penelitian yang dilakukan oleh besar serta Pilcher (2012), yang menyatakan bahwa penerapan serta peningkatan sistem akuntabilitas kinerja yang berkelanjutan akan berdampak di pencegahan fraud.

Tabel 13 Hasil Uji t Model 3

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,706	,297		5,749	,000
X	,611	,077	,730	7,930	,000

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Sesuai Tabel 4.14, diindikasikan bahwa variabel akuntansi sektor publik (X) memiliki perhitungan sebesar 7,930 dengan nilai $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa H3 diterima, sebagai akibatnya Anda dapat mengetahui bahwa variabel akuntansi sektor publik (X) mempunyai dampak yang signifikan terhadap pencegahan penipuan (Y) serta mempunyai nilai positif. Merupakan, Jika akuntansi sektor publik meningkat, pencegahan fraud akan semakin tinggi. Sebaliknya, Jika akuntansi sektor publik menurun, pencegahan penipuan akan menurun.

Penggunaan akuntansi sektor publik dengan fraud berperan sebagai aspek pengawasan, investigasi. Tujuan berasal penelitian ini artinya buat menilai apakah aplikasi aktivitas yang sebenarnya sinkron dengan apa yang seharusnya. Dengan demikian, fokusnya merupakan di upaya identifikasi penyimpangan atau kendala pada aplikasi aktivitas tersebut. Menggunakan demikian, sebagaimana diperolehnya hasil, akuntansi sektor publik berperan pada pencegahan fraud, sebagaimana mestinya, sebagaimana nilai yang diperoleh menunjukkan bahwa akuntansi sektor publik berdampak di pencegahan fraud, sehingga dengan meningkatnya penggunaan akuntansi sektor publik maka akan berkontribusi pada pencegahan fraud serta sebaliknya, Bila penggunaan akuntansi pada sektor publik akan lemah, pencegahan penipuan akan melemah.

Akibat penelitian ini sejalan menggunakan akibat penelitian yang dilakukan oleh Santoso et., al (2008), yang menyatakan bahwa akuntabilitas instansi pemerintah mensugesti pencegahan fraud.

Hasil uji sobel

Hasil uji Sobel dalam penelitian ini bertujuan buat mengetahui imbas signifikansi antara variabel eksogen terhadap variabel endogen melalui variabel intermediet. Adapun hasilnya sesuai menggunakan rumus pada bawah ini.

$$\begin{aligned}\text{SobelTest} &= \frac{ab}{\sqrt{b^2sa^2+a^2sb^2}} \\ \text{Sobel Test} &= \frac{0,669 \times 0,760}{\sqrt{0,760^2 0,086^2 + 0,669^2 0,086^2}} \\ \text{Sobel Test} &= \frac{0,50844}{\sqrt{0,004272 + 0,00331}} \\ \text{Sobel Test} &= \frac{0,50844}{\sqrt{0,007582}} \\ \text{Sobel Test} &= \frac{0,50844}{0,087075} \\ \text{Sobel Test} &= 5,839091\end{aligned}$$

Berdasarkan nomor serta rumus tadi, diketahui bahwa nilai uji Sobel artinya 5,839091 dan nilai *One-tailed probability* sebesar 0,00, sehingga 5,839091 lebih besar asal 1,96 serta 0,00 kurang asal 0,05, sebagai akibatnya H4 diambil dengan nilai bahwa variabel akuntabilitas kinerja lembaga publik (Z) bisa memediasi akibat antara variabel akuntansi sektor publik (X) terhadap pencegahan fraud (Y) serta nilai positif. adalah, Jika akuntansi sektor publik tumbuh melalui akuntabilitas forum publik buat kinerja, pencegahan fraud akan semakin meluas. di sisi lain, Jika akuntansi sektor publik berkurang melalui akuntabilitas forum publik, maka pencegahan fraud akan menurun.

Akuntansi sektor publik ialah salah satu proses pencatatan, pengklasifikasian, analisis dan pelaporan transaksi keuangan berasal suatu badan publik yang memberikan berita keuangan, sedangkan akuntabilitas atas kinerja otoritas publik artinya bentuk akuntabilitas pada mencapai tujuan sinkron dengan misi. menggunakan demikian, menggunakan adanya berita yang baik melalui penerapan akuntansi sektor publik dan didukung oleh akuntabilitas terhadap aktivitas lembaga publik yang bisa diperhitungkan, hal ini akan berdampak di terciptanya pencegahan fraud yang lebih efektif, sehingga penerapan akuntansi sektor publik melalui akuntabilitas kinerja yang baik maka pencegahan fraud akan baik, namun Jika penggunaan akuntansi sektor publik melalui akuntabilitas produktivitas yang buruk, maka mencegah penipuan akan menjadi jelek

Hal ini sejalan menggunakan Santoso et., al (2008), yang menyatakan bahwa akuntabilitas instansi pemerintah menghipnotis pencegahan fraud melalui akuntabilitas terhadap kinerja forum publik..

Simpulan

- 1) Variabel akuntansi sektor publik berdampak signifikan terhadap akuntabilitas forum publik.
- 2) Variabel akuntabilitas lembaga publik berdampak signifikan terhadap pencegahan fraud.
- 3) Variabel akuntansi sektor publik memiliki dampak yang signifikan terhadap pencegahan fraud.
- 4) Variabel akuntansi sektor publik memiliki akibat signifikan terhadap pencegahan fraud melalui akuntabilitas kinerja publik

Keterbatasan

Adapun keterbatasan penelitian pada penelitian ini artinya menjadi berikut:

- 1) Penelitian ini hanya berfokus pada lembaga publik di kota Malang, sebagai akibatnya hasil yang diperoleh tidak bisa digunakan menjadi pengambilan keputusan yang universal.
- 2) Model penelitian hanya memakai satu variabel independen, yaitu akuntansi sektor publik, sedangkan masih banyak variabel lain yang tidak termasuk pada contoh penelitian ini.

Saran

Sesuai temuan dan keterbatasan penelitian di atas, penulis menyampaikan saran, antara lain:

- 1) Buat peneliti selanjutnya, disarankan buat memakai objek penelitian yang berbeda sebagai akibatnya akibat yang diperoleh selanjutnya memperoleh aneka macam hasil.
- 2) Bagi peneliti tindak lanjut, disarankan buat menambahkan variabel independen seperti pengawasan internal (Ultimate, 2021) dan aturan berbasis yang akan terjadi (Pratiwi, 2016).

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Agus Dwiyanto, 2002, *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*, PSKK-UGM, Yogyakarta.
- Agusta dan Sutanto. 2013. Pengaruh Pelatihan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan CV Haragon Surabaya. *Jurnal Manajemen Bisnis*. Vol 1 (3), p. 1-9
- Anthony, Robert & Govindarajan, Vijay. 2016. *Management Control System*. Jakarta: Salemba Empat.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter. (2019). *Indonesia's 2019 Fraud Survey*. Acfe Indonesia
- Bastian, Indra. (2014). *Audit Sektor Publik*. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Biduri, Sarwenda. (2018). *Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik*. Jawa Timur. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Echols, J. M., Shadily, H., & Wolff, J. U. (1989). *An Indonesian-English Dictionary (Vol. 2)*. Cornell University Press.
- Ghozali, Imam. 2011. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar, 2003, *Ekonometri Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga.
- Haryanto dan Salmuddin serta Arifuddin, (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jones, H (1990). *Social Welfare in Third World Development*. London: MacMillan.
- LAN dan BPKP. 2010. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Modul 1. Akip. Jakarta.
- Mangkunegara. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mardiasmo.(2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset, Yogyakarta
- Mulyadi, D. 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta
- Pamungkas, B. (2012). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Ranggagading*, 12(2), 1–11.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

- Pope Jeremy, (2003). *Strategi Memberantas Korupsi, Transparency International Indonesia (The Coalition Against Corruption)*, Jakarta
- Pratiwi. 2016. Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Dessertation Universitas Komputer Indonesia*.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Salamah, N., Sudarmanto, E., & Herlisnawati, D. (2020). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bogor). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 8(3).
- Santoso, Urip dan Yohanes Joni Pambelum. 2008. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis Volume 4, Nomor 1, Hal. 14- 33 (ISSN : 0216- 1249)*.
- Sanusi Anwar, (2011), *Metode Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta
- Sihombing, E., Erlina, Rujiman, & Muda, I. (2019). The Effect of Forensic Accounting, Training, Experience, Work Load and Professional Skeptic on Auditors Ability to Detect of Fraud. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(8), 474–480
- Soleman, Rusman. 2007. Pengaruh Kompetensi, Penerapan Akuntabilitas Keuangan dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). *Disertasi Unpad*.
- Sugiyono. (2019). In *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (p. 394). Bandung : Alfabeta.
- Sutrisno, Edy. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*(Cetakan ke tujuh). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

***) Moh Adieb Ainur Rohim** adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

****) Dwiyani Sudaryanti** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang

*****) Hariri** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang